Komunikasi : Jurnal Komunikasi, Vol. 16, No. 1, Maret 2025, E-ISSN: 2579-3292, Halaman 44-52

KOMUNIKASI : Jurnal Komunikasi

Penerbit: LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

***DOI**: 10.31294/jkom.v16i1.25763* ***Website**: https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/*

Regulasi dan Kreativitas dalam Penyiaran Lokal: Studi Kasus Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau

Abdullah Mitrin[1], Rudi Rahman[2], Lia Anisa [3], Yuda Irawan[4]

[1,2,3,4] Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Hang Tuah, Pekanbaru, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel

Dikirimkan:
30 April 2025
Direvisi:
05 Mei 2025
Diterima:
10 Mei 2025
Diterbitkan:
30 Maret 2025

Abstrak - Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak kebijakan KPID Riau terhadap kreativitas dalam produksi siaran lokal, serta mengkaji tantangan dan peluang dalam menyeimbangkan regulasi dan inovasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan tahunan. Analisis dilakukan secara tematik dengan teknik triangulasi data untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi KPID Riau berhasil menjaga standar etika dan melindungi nilai-nilai budaya lokal. Namun, regulasi yang ketat juga dinilai membatasi ruang inovasi lembaga penyiaran, mengakibatkan berkurangnya variasi program. Beberapa stasiun penyiaran yang mendapat ruang lebih fleksibel terbukti mampu meningkatkan daya tarik konten dan apresiasi publik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif, melibatkan pelaku media dan akademisi dalam proses perumusan kebijakan. Dengan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, penyiaran lokal di Riau diharapkan mampu tetap inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya sebagai fondasi utama siaran publik.

Kata Kunci

Kreativitas Penyiaran
Regulasi Media
Inovasi Konten

***Abstract** - This study aims to evaluate the impact of KPID Riau's policies on creativity in local broadcast production and examine the challenges and opportunities in balancing regulation and innovation. A qualitative case study approach was used, with data collected through in-depth interviews, direct observations, and analysis of policy documents and annual reports. Thematic analysis and data triangulation techniques were employed to ensure validity. The findings show that KPID Riau's regulations have succeeded in maintaining ethical standards and preserving local cultural values. However, these strict regulations are also perceived as limiting broadcasters' room for innovation, resulting in less program diversity. Some broadcasters who were given more flexibility were found to improve content appeal and public appreciation. This study recommends implementing more adaptive and collaborative policy-making processes, involving media practitioners and academics. With regulations that are responsive to technological development and audience needs, local broadcasting in Riau is expected to remain innovative while preserving cultural values as the foundation of public broadcasting content.*

Corresponding Author:

Abdullah Mitrin, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Indonesia, 28115, Email: abdullahmitrin@htp.ac.id

PENDAHULUAN

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Penyiaran lokal memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya daerah serta menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu bagi masyarakat setempat (V. Dan et al., 2021) (Goodwin et al., 2023). Di Provinsi Riau, fungsi ini dijalankan oleh sejumlah stasiun penyiaran yang berada di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau (Mitrin et al., 2023)(Riedl et al., 2023). KPID Riau, sebagai lembaga pengawas dan regulator, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyiaran lokal berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang diharapkan dapat menjaga etika penyiaran, melindungi nilai-nilai budaya lokal, serta memenuhi kebutuhan informasi public (Winda Kustiawan et al., 2022). Namun, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, KPID Riau dihadapkan pada tantangan besar, yaitu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dan kebutuhan akan ruang kreativitas dalam produksi konten siaran. Banyak stasiun penyiaran lokal yang merasa terbatas oleh peraturan yang dianggap menghambat kebebasan berekspresi dan kreativitas mereka dalam menciptakan program-program yang inovatif dan menarik. Penelitian yang dilakukan oleh Mitrin (2022) menunjukkan bahwa tekanan akibat regulasi ini berdampak pada minimnya variasi program siaran, serta berkurangnya peluang bagi munculnya format-format baru dalam dunia penyiaran lokal (Mitrin et al., 2023) (Budiman Sugandi et al., 2022). Di sisi lain, regulasi yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko munculnya konten-konten yang tidak sesuai dengan norma budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat (Permana et al., 2019). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap degradasi kualitas konten siaran lokal yang dapat berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap media local (Studi et al., 2018). Oleh karena itu, peran KPID dalam menjaga keseimbangan antara regulasi dan kreativitas menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan penyiaran lokal di Riau. Kreativitas adalah elemen kunci yang menentukan daya tarik suatu program siaran. Siregar (2020) mengungkapkan bahwa program-program yang bersifat inovatif cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menarik perhatian audiens, meningkatkan rating siaran, serta menghasilkan tingkat kepuasan penonton yang lebih tinggi (Mercy et al., 2022) (Abdullah Mitrin & Tania Dwika Putri, 2022). Oleh karena itu, adanya kebijakan penyiaran yang mampu mendukung inovasi tanpa mengorbankan standar etika dan kualitas sangat krusial bagi keberlanjutan industri penyiaran local (Ahmed et al., 2019) (Larisu et al., 2022).

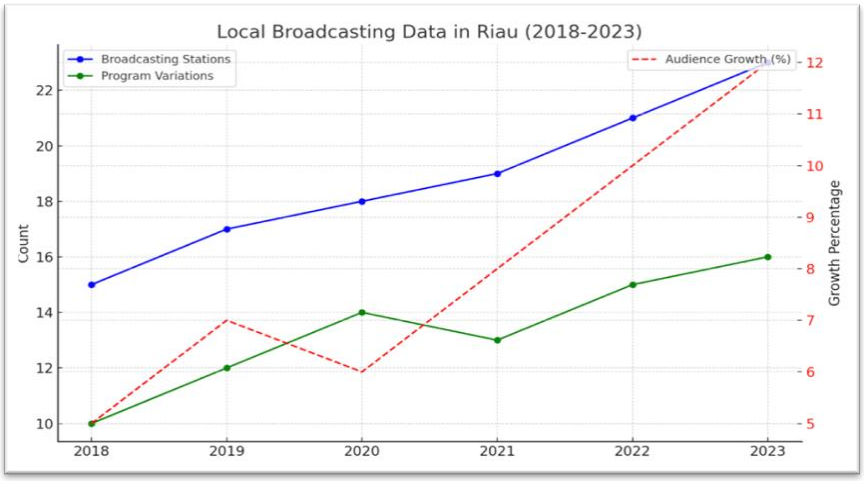

Sumber: Local Broadcasting Data Riau (2025)

Gambar 1. Perkembangan jumlah stasiun penyiaran, variasi program, dan pertumbuhan audiens di Riau (2018-2023)

Gambar 1 diatas menunjukkan dinamika pertumbuhan sektor penyiaran lokal selama lima tahun terakhir. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah stasiun penyiaran meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, variasi program dan tingkat pertumbuhan audiens tidak sepenuhnya mengikuti tren yang sama. Terlihat adanya stagnasi bahkan penurunan dalam keragaman program pada tahun 2020–2021, yang kemungkinan disebabkan oleh pembatasan konten imbas regulasi yang ketat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini memperkuat temuan bahwa regulasi yang terlalu membatasi dapat menghambat kreativitas lembaga penyiaran dalam menciptakan program-program baru. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2023, terjadi lonjakan dalam pertumbuhan audiens seiring dengan adaptasi stasiun penyiaran terhadap format digital dan konten berbasis budaya lokal, yang menandakan adanya peluang besar jika regulasi diselaraskan dengan inovasi.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi media, stasiun penyiaran lokal harus mampu beradaptasi dan bersaing dengan platform media baru, seperti media digital dan streaming (Mercy et al., 2022). Regulasi yang terlalu ketat dapat menghalangi upaya stasiun penyiaran dalam menciptakan konten yang inovatif dan relevan dengan perubahan preferensi audiens (Budiman Sugandi et al., 2022) (Riedl et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel untuk memberi ruang bagi kreativitas, tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial penyiaran. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam kajian terdahulu terkait regulasi penyiaran dan kreativitas lokal, khususnya di Provinsi Riau, di mana kajian empiris yang meneliti dampak kebijakan KPID terhadap inovasi konten masih terbatas. Sementara penelitian sebelumnya (Handayani, 2021; Siregar, 2020) telah mengkaji tekanan regulasi dalam penyiaran dan bagaimana inovasi mampu meningkatkan daya tarik audiens, belum banyak yang secara khusus mengaitkan peran regulasi lokal dengan kemampuan stasiun penyiaran untuk berinovasi (Budiman Sugandi et al., 2022) (Permana et al., 2019). Kajian yang ada lebih fokus pada aspek legal dan kepatuhan etika di tingkat nasional, tanpa memberikan perhatian khusus pada konteks daerah yang lebih kecil seperti Riau, yang memiliki dinamika sosial-budaya tersendiri (Mitrin et al., 2023). Selain itu, kurangnya analisis tentang bagaimana regulasi yang ketat memengaruhi keberagaman program dan respons audiens terhadap program kreatif menciptakan celah untuk mengeksplorasi solusi kebijakan yang lebih adaptif, yang memungkinkan kreativitas tumbuh tanpa mengorbankan nilai budaya lokal. Penelitian ini akan menjembatani kesenjangan tersebut dengan menawarkan perspektif baru tentang keseimbangan antara regulasi dan inovasi di penyiaran lokal (Mitrin et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan KPID Riau terhadap kreativitas dalam produksi siaran lokal. Untuk itu, penelitian ini secara eksplisit mengajukan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana dampak kebijakan KPID Riau terhadap kreativitas dalam produksi siaran lokal? dan (2) Bagaimana tantangan dan peluang dalam menyeimbangkan regulasi dengan kebutuhan inovasi di ranah penyiaran lokal.

Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh stasiun penyiaran dalam menyeimbangkan antara regulasi dan kebutuhan akan inovasi program siaran. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi media, tanpa mengorbankan nilai budaya dan standar etika. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penyiaran lokal yang mendukung kreativitas serta keberlanjutan industri penyiaran di Riau, sehingga penyiaran lokal tetap dapat memainkan peran strategisnya dalam menjaga identitas budaya dan menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat. (Goodwin et al., 2023) (Abdullah et al., 2023).

Grand Theory: Teori Strukturasi

Teori Strukturasi Anthony Giddens sangat relevan untuk memahami bagaimana regulasi penyiaran lokal oleh KPID Riau mempengaruhi kreativitas dalam produksi konten. Menurut Giddens, struktur dan agensi saling berinteraksi dalam sebuah dualitas, di mana struktur sosial (seperti aturan atau regulasi) bukan hanya membatasi tindakan individu atau organisasi (agensi), tetapi juga menyediakan peluang untuk bertindak (Achmad, 2020). Dalam konteks penelitian ini, regulasi KPID Riau berfungsi sebagai struktur yang menetapkan batasan bagi stasiun penyiaran lokal, terutama dalam menjaga standar etika dan norma budaya local (Widihastuti, 2019). Namun, di sisi lain, stasiun penyiaran sebagai agen memiliki kapasitas untuk berinovasi dan beradaptasi dengan regulasi tersebut. Misalnya, meskipun ada aturan ketat tentang konten yang dapat disiarkan, para pelaku penyiaran dapat menemukan cara kreatif untuk menciptakan program yang tetap mematuhi regulasi namun tetap menarik bagi audiens (Abstrak, n.d., 2019). Menurut Giddens, struktur ini bukanlah sesuatu yang statis, melalui tindakan-tindakan kreatif dari agen, struktur bisa berubah atau diadaptasi. Jika stasiun penyiaran merasa terkekang oleh regulasi KPID, mereka bisa mendorong perubahan dengan menunjukkan bagaimana inovasi dapat berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya local (Achmad, 2020; Widihastuti, 2019). Teori Strukturasi membantu menjelaskan keseimbangan antara regulasi yang ketat (yang berpotensi membatasi kreativitas) dan kemampuan agen untuk berinovasi di dalam batas-batas regulasi tersebut (Achmad, 2020). Ini mencerminkan hubungan dinamis antara KPID dan pelaku penyiaran lokal, di mana regulasi tidak sepenuhnya menghambat kreativitas, tetapi juga dapat memacu inovasi dengan memberikan kerangka etika dan nilai-nilai yang harus diikuti.

Middle Theory: Teori Dependensi Media

Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini menyatakan bahwa dalam hubungan antara media, audiens, dan masyarakat, terdapat saling ketergantungan yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sistem sosial, media, dan audiens itu sendiri (Ido et al., n.d.; Rohmah & Rahmawati, 2023). Dalam konteks penelitian Anda, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara stasiun penyiaran lokal, KPID Riau sebagai regulator, dan masyarakat lokal sebagai audiens (Rahmi Mulyasih et al., 2019). Regulasi penyiaran oleh KPID bisa dilihat sebagai upaya untuk menjaga ketergantungan yang sehat antara media dan masyarakat, terutama dalam hal menjaga nilai-nilai budaya local (Ido et al., 2018). Namun, stasiun penyiaran lokal juga bergantung pada kebebasan untuk berinovasi agar bisa menarik audiens dan tetap relevan di era digital. Dengan demikian, Teori Dependensi Media sangat membantu dalam menjelaskan bagaimana hubungan saling bergantung antara regulasi, media, dan audiens memengaruhi inovasi dan kreativitas dalam penyiaran lokal.

Teori Strukturasi dan Teori Dependensi Media saling melengkapi dalam memahami dinamika antara regulasi dan kreativitas dalam penyiaran lokal. Teori Strukturasi menekankan interaksi antara struktur (regulasi) dan agensi (lembaga penyiaran), di mana struktur tidak hanya membatasi, tetapi juga memungkinkan tindakan kreatif. Sementara itu, Teori Ketergantungan Media menyoroti hubungan saling bergantung antara media, audiens, dan sistem sosial, di mana regulasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan informasi dan norma budaya yang diterima masyarakat. Dengan demikian, kedua teori ini memberikan landasan yang kuat dalam melihat bagaimana lembaga penyiaran berupaya berinovasi di bawah kerangka regulatif, sekaligus menjaga relevansi sosial dan kultural konten yang diproduksi.

Tabel 1. Hubungan antara Regulasi KPID dan Pengaruh terhadap Agensi Media

Regulasi KPID (Struktur)	Respons Lembaga Penyiaran (Agensi)
Pembatasan konten siaran berbasis norma budaya	Menyesuaikan format program agar tetap etis namun kreatif
Ancaman sanksi terhadap pelanggaran siaran	Menghindari tema eksperimental dan memilih konten aman
Panduan standar program siaran (P3SPS)	Berinovasi dalam batas pedoman etika dan teknis
Minimnya partisipasi dalam perumusan kebijakan	Mendorong kolaborasi dengan regulator untuk revisi regulasi

Sumber: Penelitian (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebijakan KPID Riau dalam penyiaran lokal, dengan fokus pada evaluasi dampaknya terhadap kreativitas dan inovasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan observasi langsung terhadap kegiatan KPID Riau. Studi dokumentasi mencakup analisis dokumen kebijakan dan laporan tahunan, sementara wawancara semi-terstruktur bertujuan untuk menggali pengalaman dan pandangan terkait kebijakan tersebut (K. Dan, n.d., 2020). Observasi dilakukan untuk memahami proses pengambilan keputusan dan dinamika penerapan kebijakan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi isu utama dan menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan (K. Dan, n.d., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang mendukung keseimbangan antara regulasi dan inovasi dalam penyiaran lokal (Marlina et al., 2022).

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan isu kebijakan dan penyiaran lokal di Provinsi Riau. Narasumber terdiri dari 7 orang, yang meliputi: dua anggota KPID Riau, dua manajer program dari stasiun penyiaran lokal (LPP dan LPS), dua akademisi yang memiliki fokus pada kajian media dan komunikasi, serta satu perwakilan dari komunitas media independen. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman, posisi strategis, serta keterlibatan mereka dalam proses perumusan atau pelaksanaan kebijakan penyiaran. Wawancara dilakukan secara langsung dan daring, masing-masing berlangsung antara 45 hingga 90 menit. Teknik wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel berdasarkan konteks jawaban narasumber. Analisis data

dilakukan dengan pendekatan analisis tematik melalui beberapa tahap: (1) familiarisasi data, yaitu membaca ulang transkrip wawancara dan catatan observasi untuk memahami keseluruhan konteks; (2) pengkodean awal terhadap segmen-segmen data yang relevan; (3) pencarian tema, dengan mengelompokkan kode-kode ke dalam tema yang lebih luas seperti "pembatasan inovasi", "adaptasi lembaga", dan "aspirasi terhadap fleksibilitas regulasi"; (4) peninjauan tema untuk memastikan keterkaitan antar data dan tema; dan (5) pendefinisian dan penamaan tema sebagai dasar dalam menyusun temuan penelitian. Untuk menjaga validitas, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi KPID Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan KPID Riau secara umum telah berhasil menjaga standar etika dan kualitas siaran,terutama dalam melindungi nilai-nilai budaya lokal. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut kerap dianggap membatasi ruang gerak LPS dan LPP dalam berinovasi (Mitrin et al., 2023). Beberapa stasiun penyiaran menyatakan bahwa regulasi yang ketat menimbulkan kekhawatiran akan sanksi, sehingga mereka cenderung menghindari konten yang lebih kreatif atau eksperimental (Permana et al., 2019). Meskipun demikian, temuan dilapangan ini juga menunjukkan bahwa regulasi tersebut penting untuk memastikan agar konten tetap relevan dengan norma-norma masyarakat, serta mencegah penyebaran konten yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (Dwi Ashrianto, 2015; Rahayu, 2019). Disisi lain, evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan KPID Riau harus dievaluasi secara berkala, upaya ini dilakukan sebagai bentuk mempertebal pemahaman tentang aturan penyiaran serta mengasah kemampuan analisa dan sensitifitas masyarakat khususnya insan penyiaran terhadap bentuk tayangan, mengingat perkembangan pesat dalam teknologi dan tren media (Kustiawan et al., 2022; Sumiaty et al., 2012).

Melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti praktisi media dan akademisi, ditemukan bahwa kebijakan yang lebih adaptif dapat meningkatkan kreativitas tanpa mengabaikan pentingnya standar kualitas dan etika. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi KPID Riau, terutama dalam hal kepatuhan terhadap P3SPS, membatasi kreativitas program hiburan yang bernuansa lokal. "R" narasumber dari LPP menyatakan:

> "Kami ingin mencoba konsep baru yang lebih interaktif, tapi khawatir dinilai tidak sesuai dengan norma yang diatur KPID."

Hal ini menyebabkan lembaga penyiaran memilih format yang konservatif dan menghindari eksperimen format baru. Beberapa stasiun penyiaran juga merespons dengan adaptif terhadap regulasi. Mereka melakukan pelatihan internal untuk memahami batasan regulatif sekaligus mencari celah kreativitas dalam pedoman yang ada. Seorang manajer program dari salah satu LPS lokal menyebut:

> "Kami tetap kreatif, tapi dengan batasan tertentu. Kami fokus pada budaya lokal agar tetap aman secara regulasi dan menarik untuk penonton".

Dari temuan dilapangan mayoritas narasumber menyuarakan perlunya pembaruan regulasi secara periodik. Mereka menilai bahwa regulasi saat ini masih berbasis media konvensional dan kurang responsif terhadap tren digital. Ada harapan agar KPID lebih terbuka pada diskusi regulasi bersama dengan pelaku industri dan akademisi. Digitalisasi media telah mengubah cara masyarakat mengakses konten, terutama lewat platform seperti YouTube, Instagram, dan layanan streaming. Hal ini mendorong stasiun penyiaran lokal untuk berinovasi agar tetap diminati. Beberapa pelaku media menyebut bahwa platform digital memberi ruang baru untuk bereksperimen, seperti membuat web series atau konten di balik layar yang diunggah secara eksklusif ke media sosial. Ini menjadi strategi untuk menjangkau audiens yang lebih muda dan memperluas jangkauan siaran. Namun, banyak stasiun penyiaran masih kesulitan beradaptasi karena belum ada regulasi yang mendukung integrasi antara siaran konvensional dan digital. Aturan yang ada masih fokus pada media tradisional dan belum mengatur hal-hal seperti hak cipta digital, etika konten daring, atau format siaran fleksibel. Akibatnya, potensi digitalisasi belum dimanfaatkan secara maksimal. KPID Riau perlu menyusun

kebijakan yang tidak hanya mengatur, tapi juga mendorong inovasi di berbagai platform digital agar penyiaran lokal tetap relevan di era teknologi saat ini.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Tematik dari Wawancara dan Dokumen

Tema Utama	Temuan Lapangan
Pembatasan Program Hiburan	Stasiun enggan membuat program baru karena takut melanggar regulasi
Adaptasi Lembaga Penyiaran	Pelatihan internal dilakukan untuk memahami batasan kreatif
Tuntutan Fleksibilitas	Narasumber meminta evaluasi regulasi agar sesuai perkembangan digital

Sumber: Penelitian (2025)

Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendekatan kolaboratif, yaitu dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, yang dapat memastikan kebijakan tersebut lebih relevan dengan kebutuhan industri penyiaran. Selain itu, studi ini menemukan bahwa penerapan kebijakan yang lebih fleksibel memungkinkan stasiun penyiaran lokal untuk mengeksplorasi format dan genre konten yang lebih bervariasi. Beberapa stasiun penyiaran yang diberikan kebebasan lebih dalam berinovasi terbukti mampu meningkatkan daya tarik program-program mereka, baik dari segi rating maupun apresiasi publik. Hasil ini mengindikasikan bahwa kreativitas dalam penyiaran lokal berpotensi besar untuk berkembang jika didukung oleh kebijakan yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika sosial budaya. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam proses pengambilan keputusan kebijakan oleh KPID Riau (P3SPS KPID Jawa Barat, n.d. 2018).

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan diyakini dapat menciptakan lingkungan regulasi yang lebih inklusif, di mana aspirasi dan kebutuhan pelaku industri serta masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Dengan cara ini, kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan media dapat diterapkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas penyiaran lokal di Provinsi Riau. Dalam mendukung inovasi dan kreatifitas, penelitian ini merekomendasi agar KPID Riau mengadopsi mekanisme evaluasi kebijakan yang bersifat dinamis dan kontinyu tanpa mengabaikan kontrol kualitas dan etika penyiaran. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial, teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan pelaku industri penyiaran. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, diharapkan penyiaran lokal di Riau dapat tetap inovatif dan relevan, tanpa mengorbankan esensi budaya dan nilai-nilai local (Kustiawan et al., 2022). Benang merah dari penelitian ini menawarkan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan penyiaran yang lebih seimbang antara regulasi dan kreativitas. Harapannya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi bagi KPID Riau dan lembaga terkait lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi konten penyiaran lokal, sehingga dapat meningkatkan daya saing penyiaran di era digital saat ini.

Dari gambar 2 dibawah ini dapat memperlihatkan keseimbangan yang harus dicapai antara tantangan dan solusi dalam ranah regulasi dan kreativitas penyiaran lokal. Di satu sisi, tantangan seperti ketatnya aturan, kekhawatiran terhadap sanksi, dan ketidaksesuaian dengan tren digital menimbulkan tekanan signifikan pada pelaku media. Di sisi lain, solusi yang muncul dari lapangan seperti pendekatan kolaboratif, pembaruan regulasi secara berkala, serta pelatihan internal dan dialog terbuka memberikan jalan keluar yang memungkinkan adanya inovasi tanpa mengesampingkan etika penyiaran. Visualisasi ini memperkuat argumen bahwa penyiaran lokal tidak bisa berkembang hanya dengan pendekatan top-down, melainkan membutuhkan dialog terus-menerus yang memungkinkan kebijakan tumbuh secara responsif dan partisipatif. Gambar diatas mempertegas bahwa solusi kebijakan yang bersifat adaptif dan inklusif adalah kunci dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat di tingkat lokal.

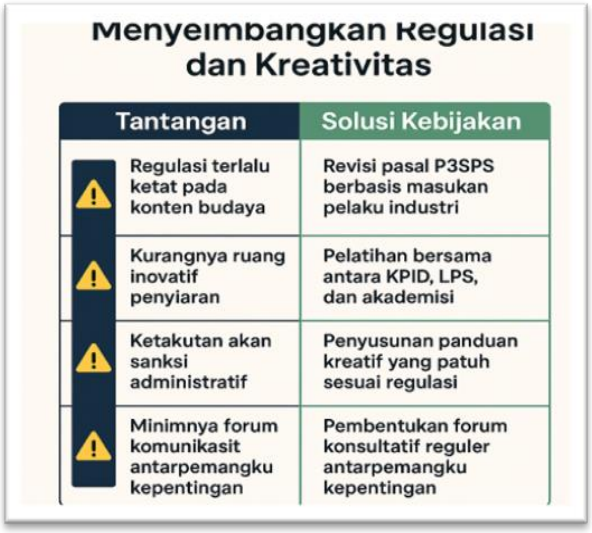

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 2. Tantangan vs Solusi: Menyeimbangkan Regulasi dan Kreativitas

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran KPID Riau dalam mengatur penyiaran lokal, yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator bagi kreativitas dan inovasi di sektor penyiaran. Meskipun regulasi yang diterapkan oleh KPID Riau bertujuan untuk menjaga etika dan nilai-nilai budaya lokal, temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sering kali dianggap membatasi ruang gerak stasiun penyiaran dalam menciptakan konten yang inovatif. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap regulasi dan kebebasan berkreasi agar stasiun penyiaran lokal dapat tetap relevan dan menarik bagi audiens. Kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi media sangat diperlukan untuk mendorong inovasi dalam penyiaran lokal. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti praktisi media dan akademisi, KPID Riau dapat merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Penelitian ini menemukan bahwa stasiun penyiaran yang diberikan kebebasan lebih dalam berinovasi mampu meningkatkan daya tarik program-program mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rating dan apresiasi publik terhadap konten yang disiarkan. Lebih jauh, penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan di KPID Riau sangat penting untuk menciptakan lingkungan regulasi yang inklusif. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan diyakini dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pelaku industri serta masyarakat secara lebih efektif. Dengan cara ini, kebijakan yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap perkembangan media dan perubahan sosial, sehingga kualitas penyiaran lokal di Riau dapat terjaga dan ditingkatkan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan penyiaran lokal yang seimbang antara regulasi dan kreativitas. Rekomendasi kebijakan yang disarankan mencakup: (1) revisi terhadap pasal-pasal dalam pedoman P3SPS yang dianggap terlalu membatasi inovasi kreatif; (2) pelaksanaan pelatihan bersama antara KPID, LPS, dan akademisi mengenai etika dan kreativitas penyiaran; serta (3) pembentukan forum konsultatif reguler untuk membahas dinamika konten dan regulasi secara partisipatif. Dengan langkah-langkah ini, penyiaran lokal di Riau diharapkan dapat terus beradaptasi dan berkembang di era digital, tanpa mengorbankan esensi budaya dan nilai-nilai lokal yang menjadi landasan identitas masyarakat.

REFERENSI

Abdullah, I., Sri, M., Abdul, S., Iskandar, M., Alvionita, V., Susanto, A., Bin, A., Soepri, A., Moedji, T., Fitria, W., Leili, A., & Gustini, K. (n.d.). Komunikasi Interpersonal Dan Praktek Konseling. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Abdullah Mitrin, & Tania Dwika Putri. (2022). Political Communication Strategy H. Sumaryo, BA as a Legislative Member Candidate in the 2019 General Election in Siak Regency. Formosa Journal of Multidisciplinary

Research, 1(8), 1767–1778. https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i8.2311

Abstrak. (n.d.). Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens.

Achmad, Z. A. (2020). Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens Anatomy Of Structuration Theory And Ideology Of The Third Way Of Anthony Giddens. In Jurnal Translitera (Vol. 9, Issue 2).

Ahmed, Y. A., Ahmad, M. N., Ahmad, N., & Zakaria, N. H. (2019). Social media for knowledge-sharing: A systematic literature review. In Telematics and Informatics (Vol. 37, pp. 72–112). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.01.015

Budiman Sugandi, A., Aziz, H., & Asmarawati, T. (2022). Penggunaan Bahasa Program Televisi Yang Tidak Tepat Di Masyarakat. 3(2).

Dan, K. (n.d.). METODE PENELITIAN KUANTITATIF.

Dan, V., Paris, B., Donovan, J., Hameleers, M., Roozenbeek, J., van der Linden, S., & von Sikorski, C. (2021). Visual Mis- and Disinformation, Social Media, and Democracy. Journalism and Mass Communication Quarterly, 98(3), 641–664. https://doi.org/10.1177/10776990211035395

Dwi Ashrianto, P. (2015). Studi Kesiapan Lembaga Penyiaran Terhadap Penerapam Sistem Penyiaran Berteknologi Digital di Yogyakarta. In Jurnal Ilmu Komunikasi (Vol. 13, Issue 2). halaman.

Goodwin, A., Joseff, K., Riedl, M. J., Lukito, J., & Woolley, S. (2023). Political Relational Influencers: The Mobilization of Social Media Influencers in the Political Arena. In International Journal of Communication (Vol. 17). http://ijoc.org.

Ido, D., Hadi, P., Si, M., Wahjudianata, M., Sos, S., Med, M., Kom Inri, I., & Indrayani, S. I. P. (n.d.). KOMUNIKASI MASSA. www.google.com

Kustiawan, W., Razkiatul,);, Matondang, F., Alfina, S., Hibriyanti,), & Nabila, S. (2022). TVRI TV Station Broadcasting Management Manajemen Penyiaran Stasiun TV TVRI (Vol. 1, Issue 2).

Larisu, Z., Imroatus Sholikah, D., Salman Alfansuri Jacob, M., & Mitrin, A. (n.d.). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal The Film "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" Between Commercialization or New Direction. https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5516

Marlina, M. D., Eri, Y., & Arvianti, S. P. (2022). ILMU KOMUNIKASI. https://ssrn.com/abstract=4170278

Mercy, D., Abdullah, R., Arief, M., Rukmana, Y., Rahmah, S., Iskandar, A., Natasari, N., Octalia, E., Hagi, I. L., Salas, J., Tanseba, M., Marini, A., Nurcholis, M., Nur, M., Angga, K., Permana, A., Irfan, M., Tania, A., & Putri, D. (n.d.). KOMUNIKASI KOMUNIKASI KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL DI ERA DIGITAL DI ERA DIGITAL.

Mitrin, A., Rahman, R., & Putra, N. D. D. (2023). Implementation of LPP TVRI Riau's Analog Switch-Off (ASO) Migration in Welcome to the Digitalization of Indonesian Broadcasting. International Journal of Advance Social Sciences and Education (IJASSE), 1(4), 229–236. https://doi.org/10.59890/ijasse.v1i4.1014

P3SPS KPID JAWA BARAT. (n.d.).

Permana, R. S. M., Abdullah, A., & Mahameruaji, J. N. (2019). Budaya Menonton Televisi di Indonesia: Dari Terrestrial Hingga Digital. ProTVF, 3(1), 53. https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i1.21220

Rahayu, R. (2019). https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/issue/view/1285. Jurnal Komunikasi, 14(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol14.iss1.art1

Rahmi Mulyasih, O., Kunci, K., Media, D., Negara Berkembang, K., Negara Maju, K., & Sosial Budaya Masyarakat Indonesia, P. (n.d.). DEPENDENCY MEDIA PADA MASYARAKAT INDONESIA.

Riedl, M. J., Lukito, J., & Woolley, S. C. (2023). Political Influencers on Social Media: An Introduction. Social Media and Society, 9(2). https://doi.org/10.1177/20563051231177938

Rohmah, N. N., & Rahmawati, E. (2023). Interpretation of Media System Dependency Theory on Financial Technology. Jurnal ASPIKOM, 8(1), 153. https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i1.1186

Studi, P., Komunikasi, I., Upn, F., Jakarta, V., & Kartikawati, D. (n.d.). Volume 1 Nomor 1. Juli-Desember 2018 Implementasi Difusi Inovasi Pada Kemampuan Media Baru Dalam Membentuk Budaya Populer (Kajian Pada Media Youtube di Kalangan Remaja).

Sumiaty, N., Pengkajian, B., Komunikasi, P., Bandung, I., & Pajajaran, J. (2012). 88 Bandung 40173, Fax. (022) 6021740 Naskah diterima tanggal 2 Oktober. http://bahankuliahikomunand.files.wordp

Widihastuti, R. A. (2019). Dualitas Struktur Dan Agen Dalam Cerpen "Kabut Neraka" Karya Danarto: Analisis

Teori Strukturasi Anthony Giddens (Vol. 3, Issue 2).

Winda Kustiawan, Tifani Liusnimun, Nurul Hidayat, & Jaman Wahidin. (2022). Komunikator Utama dalam Politik, Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik. J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam, 3(1), 13–22. https://doi.org/10.53429/j-kis.v3i1.421